



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian yang dilakukan oleh *Kompas.com* dan *Sindo.news* dalam memberitakan transportasi berbasis aplikasi *online*. Setelah dua puluh tujuh berita tersebut dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua media melakukan *framing* yang berbeda dengan kasus tersebut.

Pendefinisian masalah dari kasus ini sedikit berbeda diantara kedua media. *Kompas.com* mendefinisikan transportasi berbasis aplikasi *online* telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut, dinilai karena pihak perusahaan yang tidak memiliki izin operasional dan kendaraan yang digunakan menggunakan pelat berwarna hitam. Sementara *Sindo.news* melihat bahwa permasalahan yang terjadi dalam transportasi berbasis aplikasi *online* karena perusahaan tersebut tidak pernah mengurus perizinan operasional. Meski begitu, kedua media sama-sama memandang bahwa perusahaan transportasi berbasis aplikasi memang melanggar hukum di Indonesia.

*Kompas.com* menyatakan sumber masalah jasa penyedia layanan transportasi tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku di Ibu Kota. Perizinan tersebut penting karena merupakan salah satu syarat dalam menjalankan operasional di Jakarta. Tidak adanya izin yang resmi membuat perusahaan transportasi berbasis online harus memenuhi undangan dari pemerintahan. Jika undangan tersebut tidak diperhatikan maka, tindakan tegas dari pemerintah untuk memblokir situs resmi layanan transportasi berbasis online. Sementara *Sindo.news* menilai bahwa pelanggaran operasional yang dilakukan oleh pihak perusahaan berbasis aplikasi *online* namun, layanan transportasi tersebut masih terus beroperasi, padahal telah dinilai sudah melanggar syarat sebagai angkutan umum.

Keputusan moral yang dipakai kedua media pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* untuk mematuhi persyaratan-persyaratan operasional perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. *Kompas.com* juga menekankan bahwa pemblokiran yang akan dilakukan oleh pemerintah bersifat sementara, sampai pihak Uber mempunyai surat izin resmi beroperasi.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh kedua media pada dasarnya pun sama, karena harus sesuai dan memiliki landasan hukum. *Kompas.com* merekomendasikan bahwa Transportasi berbasis aplikasi harus memiliki izin dan sudah diatur oleh UU 22 tahun 2009. Transportasi umum harus

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian berikutnya adalah dengan memblokir perusahaan berbasis aplikasi *online* untuk sementara agar menimbulkan efek jera bagi perusahaan tersebut.

*Sindo.news* juga menawarkan Layanan angkutan umum berbasis aplikasi namun harus mengikuti persyaratan resmi operasional angkutan umum. Dengan 7 syarat yang ditetapkan oleh pemerintahan. Adapun terhadap Taksi Uber dan Grab Taxi, Andri meminta pemilik memenuhi tujuh syarat, yakni harus berbadan hukum, punya surat domisili usaha, izin penyelenggaraan, minimal punya lima unit kendaraan, punya pul untuk servis dan perawatan, lolos uji KIR, dan menyiapkan administrasi operasional.

## 5.2 **Saran**

Setelah melakukan analisis mengenai *Framing* transportasi berbasis aplikasi *online* di *Kompas.com* dan *Sindo.news*, peneliti mempunyai beberapa saran:

1. Peneliti ini membahas kontroversi perusahaan transportasi online perihal keberadaan beroperasi di DKI Jakarta. Maka peneliti berikutnya dapat menganalisis perihal kebijakan yang ditetapkan untuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* sehingga memperkaya penelitian

yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap angkutan umum di Ibu Kota.

2. Peneliti kualitatif mampu menunjukkan kecenderungan analisis media berdasarkan pengeksposan kesalahan yang dibuat oleh layanan transportasi berbasis *online*, konteks yang terjadi dan peran pemerintah dalam menindak kasus transportasi berbasis aplikasi *online*.
3. Penelitian ini membahas pembingkaihan isu berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan transportasi berbasis aplikasi *online* menggunakan model Robert Entman. Dimensi *framing* milik Robert Entman dibagi menjadi dua: seleksi isu dan penjolan. Namun peneliti hanya focus membahas dimensi penonjolan aspek dalam pemberitaan.

UMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA